



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN KEMRANJEN

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR KECAMATAN KEMRANJEN
JL. PUSAK WUJAHAN NO. 22 (0282) 5283288
KEMRANJEN KODE 73111

PELAYANAN MASYARAKAT
(PATEN)

PEMERINTAH KECAMATAN KEMRANJEN

KABUPATEN BANYUMAS

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kemranjen , 2 Januari 2026



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kemranjen Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Kemranjen dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

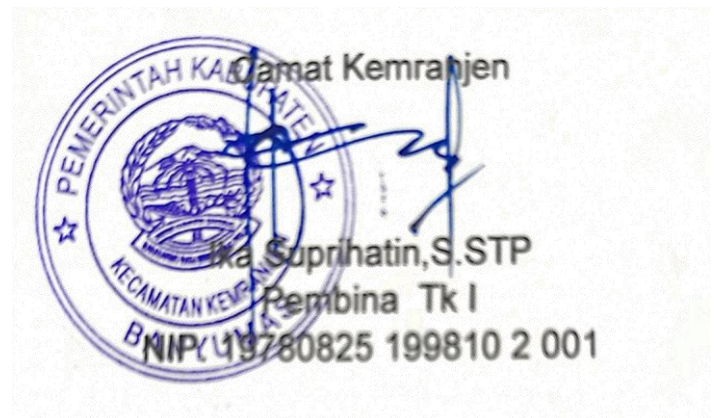
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemranjen dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama yaitu persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tercapai dengan capaian sebesar 102,93%. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kemranjen Tahun 2025.

Berdasarkan Pagu anggaran pada Kecamatan Kemranjen tahun 2025 adalah Rp. 2.605.050.218,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.246.980.008,- sehingga diperoleh capaian realisasi anggaran sebesar 86,25 %. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja, diperoleh capaian kinerja sebesar 102,93% dengan menggunakan anggaran 86,25 % telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%. Tingkat efisiensi sebesar 13.75 %.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kemranjen. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan

hasil kerja keras seluruh elemen di Kecamatan Kemranjen bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja.

Kemranjen, 2 Januari 2026



DAFTAR ISI

Halaman

Judul.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	2
C. SUSUNAN ORGANISASI	5
D. SUMBER DAYA APARATUR	6
E. ISU STRATEGIS	7
BAB II.....	9
PERENCANAAN KINERJA	9
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	11
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025.....	16
BAB III.....	17
AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	19
C. REALISASI ANGGARAN	66
D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kemranjen

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Daftar ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2025
Tabel 1.2	:	Daftar ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan 2025
Tabel 2.1	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kemranjen 2025
Tabel 2.2	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025
Tabel 3.1	:	Capaian Kinerja Tahun 2025
Tabel 3.2	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025
Tabel 3.3	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2025
Tabel 3.4	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.5	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.6	:	Efisiensi Anggaran Tahun 2025
Tabel 3.7	:	Analisa Program
Tabel 3.8	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025
Tabel 3.9	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Sampai dengan 2025
Tabel 3.10	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.11	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.12	:	Efisiensi Anggaran Tahun 2025
Tabel 3.13	:	Analisis Program Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
Tabel 3.14	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025
Tabel 3.15	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan 2025
Tabel 3.16	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.17	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.18	:	Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Tabel 3.19	:	Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran
Tabel 3.20	:	Perbandingan Target dan Realisasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kemranjen Tahun 2025
Tabel 3.21	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan 2025
Tabel 3.22	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.23	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.24	:	Efisiensi Anggaran Tahun 2025
Tabel 3.25	:	Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator
Tabel 3.26	:	Perbandingan Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Kemranjen Tahun 2025
Tabel 3.27	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan 2025
Tabel 3.28	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.29	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.30	:	Efisiensi Anggaran Tahun 2025
Tabel 3.31	:	Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator
Tabel 3.32	:	Perbandingan Target dan Realisasi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tabel 3.33	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan 2025
Tabel 3.34	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.35	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.36	:	Efisiensi Anggaran Tahun 2025
Tabel 3.37	:	Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator
Tabel 3.38	:	Perbandingan Target dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Kemranjen Tahun 2025
Tabel 3.39	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan 2025
Tabel 3.40	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.41	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Tabel 3.42	:	Efisiensi Anggaran Tahun 2025
Tabel 3.43	:	Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator
Tabel 3.44	:	Perbandingan Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kemranjen Tahun 2025
Tabel 3.45	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan 2025
Tabel 3.46	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.47	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.48	:	Efisiensi Anggaran Tahun 2025
Tabel 3.49	:	Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator
Tabel 3.50	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kemranjen Tahun 2025
Tabel 3.51	:	Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja
Tabel 3.52	:	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Kemranjen, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kecamatan Kemranjen memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Kemranjen merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Kemranjen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kecamatan Kemranjen mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

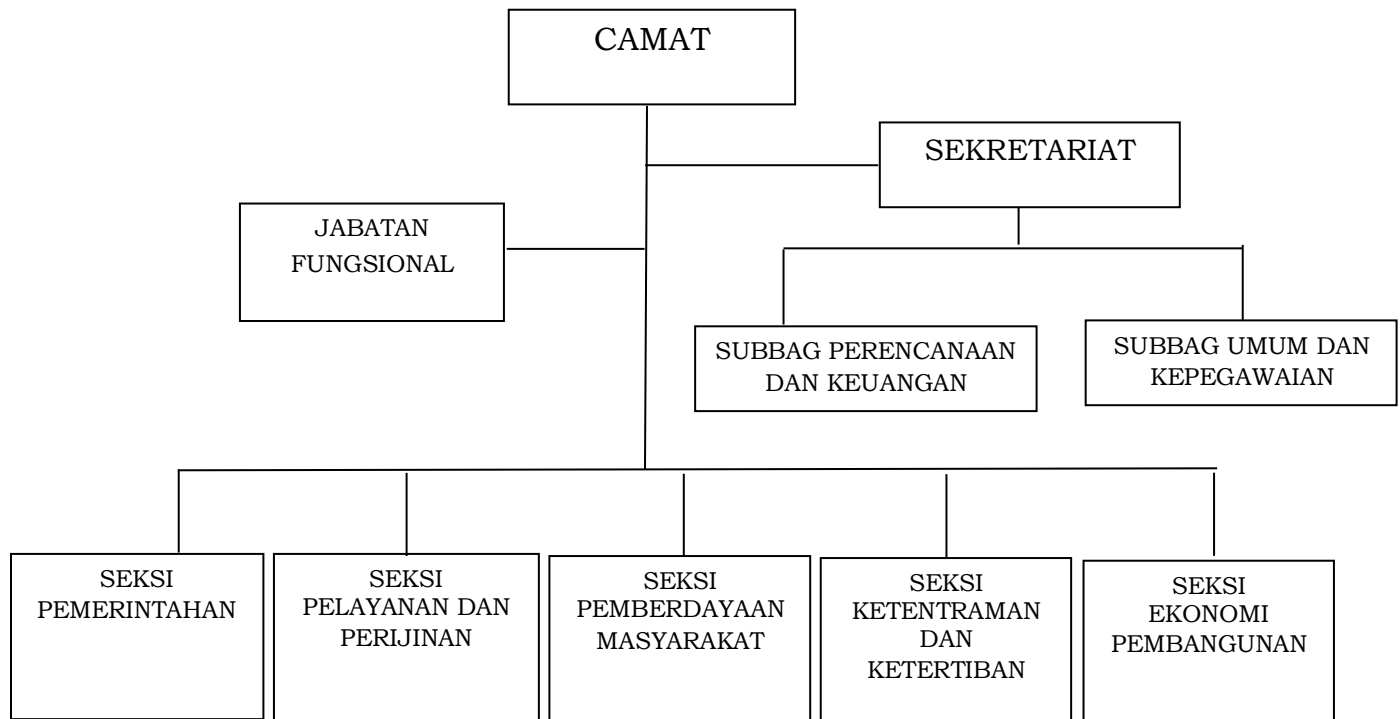
- 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Kemranjen terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kemranjen



D. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kondisi sumber daya aparatur pada Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1
ASN berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. ASN				
Golongan I	-	-	-	0 %
Golongan II	2	-	2	18.18 %
Golongan III	3	3	6	54.55 %
Golongan IV	1	1	2	18.18 %
B. PPPK	-	1	1	9.09 %
Jumlah	6	5	11	100 %

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2025

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.
ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	-	-	-	0%
SMP	-	-	-	0%
SMA	3	1	4	36.36 %
D-I	-	-	-	0%
D-II	-	-	-	0%
D-III	-	1	1	9.09 %
S-1	2	3	5	45.46 %
S-2	-	1	1	9.09 %
S-3	-	-	-	0%
Jumlah	5	6	11	100 %

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Kemranjen Tahun 2024-2026 adalah:

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Belum dilakukannya penegakan peraturan perundang – undangan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah oleh Satpol PP Kecamatan karena terhambat dengan kewenangan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemranjen merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kemranjen, dan Rencana Strategis Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Transisi yaitu masuk dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kemranjen berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan factor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

1. Visi

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyumas 2025 adalah “BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI”

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Kemranjen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) demi tercapainya visi tersebut maka wajib melaksanakan misi yang telah ditetapkan.

2. Misi

Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi dengan penjelasan sebagai berikut.

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas , maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera

Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera mengandung maksud bahwa di Kabupaten Banyumas terbangun suatu sistem pembangunan sedemikian rupa sehingga secara bertahap masyarakat Kabupaten Banyumas dapat memenuhi secara wajar segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis), yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kualitasnya, melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia (individu) – lingkungan alam – masyarakat (lingkungan sosial) – Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing).

2) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri

Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri mengandung pengertian bahwa semua unsur pemangku kepentingan pembangunan: masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan potensi Kabupaten Banyumas secara bertahap, profesional dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kehidupan tanpa tergantung pihak lain, sebagai sarana untuk membangun kepercayaan sehingga dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain.

3) Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing

Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing adalah membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang secara bertahap dapat merubah sifat pola pikir yang tradisional pragmatis menjadi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif sedemikian rupa sehingga dengan pengembangan kearifan lokal agar dapat berperan serta secara aktif di dunia internasional.

4) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari

Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang lestari dengan mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Kemranjen Tahun 2025 sebagai berikut yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kemranjen 2025

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Sumber Data
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres Positif	100%	Laporan capaian kinerja layanan kecamatan

Sumber : Rensta Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dasar hukum perjanjian kinerja ASN adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tertentu. Perjanjian Kinerja memuat penugasan dan indikator kinerja yang harus dicapai. Perjanjian kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan untuk mencapai target kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan tugas pokok fungsi, sumber daya, wewenang yang dimiliki dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi dan berkesinambungan setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA CAMAT KEMRANJEN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Formulasi : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan capaian kinerja layanan kecamatan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	100%	Formulasi untuk kecamatan tanpa kelurahan dan kecamatan dengan desa dan kelurahan: $(20\% \times \text{realisasi program pengawasan desa}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (20\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (20\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan Umum})$ Formulasi untuk kecamatan dengan kelurahan pengali nya adalah 25%. Type Perhitungan = Kumulatif Sumber data : Laporan hasil pelayanan

		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,65	Sumber data Laporan hasil Pelayanan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	80,75	Formulasi = Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Type Perhitungan = Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Nilai SPIP	3,10	Hasil Evaluasi dari Inspektorat Daerah
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	Formulasi = (APBDes tepat waktu dibagi Total APBDes) dikali 100% Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Data desa yang penetapan APBDesnya tepat waktu
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	100%	Formulasi : Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan dibagi Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang direncanakan dikali 100% Type Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterangan : Yang dimaksud penyelenggaraan pemerintahan desa adalah peran camat dalam PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 thn 2014 tentang Desa

		Presentase APBDes Tepat Waktu	100 %	Formulasi : Jumlah APBDes Tepat Waktu dibagi jumlah Kegiatan APBDes Tepat Waktu yang direncanakan dikali 100 %
		Presentase RKPDes Tepat waktu	100 %	Formulasi : Jumlah RKPDes tepat waktu dibagi jumlah kegiatan APBDes t
5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 indeks	Formulasi = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Type Perhitungan = Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
6	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	100%	Formulasi = (Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi) dikali 100% Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan penanganan gangguan trantibumlinmas
		Persentase penanganan pengaduan	100 %	Formulasi = aduan yg ditangani dibagi jumlah aduan yg masuk berdasarkan tupoksi dikali 100% Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan penanganan pengaduan
7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Formulasi = Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Type Perhitungan = kumulatif

				Sumber Data = Laporan hasil pemberdayaan masyarakat Keterangan = Yang dimaksud kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pada lembaga kemasyarakatan urusan Permas, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan keagamaan.
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan yang ditugaskan	100%	Formulasi = Persentase penyelesaian pekerjaan atas inisiasi pekerjaan yang ada (Urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali 100) Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan pelaksanaan urusan yang ditugaskan
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	Formulasi = Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan umum yang direncanakan dikali 100 Type Perhitungan = kumulatif Sumber Data = Laporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum Keterangan = Yang dimaksud penyelenggaraan pemerintahan

				umum adalah peran camat dalam PP nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan
--	--	--	--	--

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kemranjen pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kemranjen setelah perubahan sebesar Rp. 2.605.050.218 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 2.604.500.218 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 550,000

Rencana Anggaran Per Program Tahun 2025

Program	Rencana Anggaran (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.551.134.969
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.102.437
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.016.812
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.736.250
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.883.500
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.176.250
Jumlah	2.605.050.218

Sumber . Subbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Kemranjen melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas						
1.	Presentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	102.933	102,93	Tercapai
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan						
2.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	102,356	102,36	Tercapai
3.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	%	3,65	3,94	107,95	Tercapai
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan						
4.	Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	%	80,75	80,6	99,81	Tidak Tercapai
5.	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	%	3,1	3,15	101,61	Tercapai
Program 1 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
6.	Presentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	Tercapai
7.	Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	Tercapai

8.	Presentase Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	%	100	100	100	Tercapai
Program 2 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik						
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	97,25	111,78	Tercapai
Program 3 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan						
10.	Presentase Penanganan Gangguan Trantribumlimas	%	100	100	100	Tercapai
11.	Presentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	Tercapai
Program 4 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
12.	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	Tercapai
Program 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
13.	Presentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	Tercapai
14.	Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	Tercapai

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemranjen tahun 2025 adalah sebesar 101,89%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja Kecamatan Kemranjen pada tahun 2025 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas Tahun 2025 ditampilkan pada table 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	102,933	102,93%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan formulasinya (50 % dikali Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan) ditambah (50 % dikali Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan) berdasarkan data Pemerintahan Kecamatan Kemranjen dengan target 100 %, realisasinya 109,933% dan capaiannya 109,93%. Hal ini menggambarkan bahwa target kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tercapai.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya
Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	%	86	86	100
Tahun 2024				
Presentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	N/A	109,275	109,28
Tahun 2025				
Presentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	102,933	102,93

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Kemranjen di tahun 2023 sampai dengan 2025. Pada periode tahun 2023 sampai dengan 2025, diketahui bahwa data capaian kinerja tidak tersedia karena indikator Presentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tidak diukur pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Kinerja Tahun 2025, Presentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah 102,93%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Presentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	102,93	102,93	102,93	102,93

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 102,93%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 109,28%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di
-------------------	-----------	------------------	--------------------	-------------------------------------

				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Presentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	102,93%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan data perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar. Indikator yang diukur adalah "Presentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan". Realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Kemranjen adalah 109,28%. Namun, data standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar tidak tersedia atau tidak relevan, ditandai dengan "N/A" pada semua kolom.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
- 2) Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata.
- 3) Telah ditetapkan prosedur pelayanan yang jelas.
- 4) Telah ditetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas.
- 5) Adanya kepastian petugas yang memberikan pelayanan termasuk kewenangan dan tanggungjawabnya.
- 6) Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat telah ditingkatkan.
- 7) Telah meningkatkan kecepatan pelayanan.
- 8) Telah melaksanakan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.

- 9) Telah meningkatkan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- 10) Telah memberikan kepastian biaya pelayanan.
- 11) Telah memberikan kepastian jadwal pelayanan.
- 12) Telah memberikan kenyamanan lingkungan.
- 13) Telah memberikan rasa aman terhadap pelayanan
- 14) Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.
- 15) Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan secara tepat dan terpercaya.
- 16) Adanya kemauan petugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas.
- 17) Memberikan jaminan dan kepastian dalam pelayanan.
- 18) Memberikan perhatian yang tulus kepada pengguna layanan

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- a. Terdapat hambatan hasil evaluasi kinerja yang tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan atau program, sehingga solusi yang dilakukan yaitu Mengadakan evaluasi berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan kebijakan yang lebih adaptif.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Kemranjen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kemranjen dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja

- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kemranjen dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.550.946.233	2.551.134.969	(188.736)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	39.809.750	10.102.437	29.707.313
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60.191.250	17.016.812	43.174.438
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketetiban Umum	48.945.000	7.736.250	41.208.750
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.130.000	14.883.500	17.246.540
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.205.000	4.176.250	14.028.750
		2.750.227.233	2.605.050.218	145.177.015

			Efisiensi	145.177.015
--	--	--	-----------	-------------

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas antara lain :

Tabel 3.7
Analisa Program

No	Program	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	117,06%	85,99%
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	98,32%
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	99,32%
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	98,84%
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	98,47%
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	111,78%	97,47%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen adalah 104,81 % dan realisasi keuangan adalah 96,40% sehingga realisasi kinerja lebih besar capaiannya dari realisasi keuangan.

Program yang terdapat efisiensi penggunaan adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Program ini bertujuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan terdiri atas 6 kegiatan dan sub kegiatan 21 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.551.134.969 dengan realisasi sebesar Rp. 2.193.841.508 dengan tingkat capaian sebesar 85,99 %.
- 2) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini bertujuan meningkatnya pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa, dengan sasaran program meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa , terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.176.250 dengan realisasi sebesar Rp. 4.106.000 dengan tingkat capaian sebesar 98,32 %
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah dengan sasaran program meningkatnya kualitas pelayanan ditingkat kecamatan, terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.883.500 dengan realisasi sebesar Rp.14.783.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,32%.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program ini bertujuan meningkatkan pencegahan dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sasaran program meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan, terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.736.250 dengan realisasi sebesar Rp.7.646.500 dengan tingkat capaian sebesar 98,84%
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran Program. Sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan terdiri atas 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan sub dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.016.812 dengan realisasi sebesar Rp. 16.756.500 dengan tingkat capaian sebesar 98,47 %.
- 6) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Program ini bertujuan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan dengan sasaran program meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan pelayanan public dan meningkatkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, terdiri atas 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.102.437 dengan realisasi sebesar Rp.9.846.500 dengan tingkat capaian sebesar 97,47%.

2. Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan Tahun 2025 ditampilkan pada table 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	102,356	102,36%
Presentase Pelayanan Publik Kecamatan	%	3.65	107,95	107,95 %

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi Persentase capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan formulasinya $(20\% \times \text{realisasi program pengawasan desa}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (20\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (20\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan umum})$ berdasarkan data Pemerintahan Kecamatan Kemranjen dengan target 100%), realisasinya 102,356% dan capaiannya 102,36%. Hal ini menggambarkan bahwa target kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tercapai.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Presentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100	100
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100	100
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	119.11	119.11
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	%	3.65	N/A	N/A
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja pelayanan	%	100	102,36	102,36

pemerintah kecamatan				
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	%	3.65	3.94	107,95

Tabel di atas menyajikan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Kemranjen di tahun 2023 sampai dengan 2025. Pada periode tahun 2023 sampai dengan 2025, diketahui bahwa target indikator persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tercapai dengan persentase capaian sebesar 100%. Berdasarkan Kinerja Tahun 2025, Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan adalah 102,36%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Presentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Presentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	102,36	102,36	102,36	102,36
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	%	3.65	3.94	107,95	107,95	107,95

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 102,36%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2024 maka capaian kinerja sudah mencapai 102,36%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	102,36%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,94%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan data perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar. Indikator yang diukur adalah "Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan". Realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Kemranjen adalah 102,36%. Namun, data standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar tidak tersedia atau tidak relevan, ditandai dengan "N/A" pada semua kolom.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
- Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata.
- Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.

- d. Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan secara tepat dan terpercaya.
- e. Adanya kemauan petugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas.
- f. Memberikan jaminan dan kepastian dalam pelayanan.
- g. Memberikan perhatian yang tulus kepada pengguna layanan

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- a. Terdapat hambatan hasil evaluasi kinerja yang tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan atau program, sehingga Solusi yang dilakukan yaitu Mengadakan evaluasi berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan kebijakan yang lebih adaptif.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Selama Tahun 2025 Kecamatan Kemranjen telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
 - 1). Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Kemranjen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - 2). Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
 - 3). Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kemranjen dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
 - 4). Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kemranjen dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut

Tabel 3.12
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)

1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 39.809.750	Rp .10.102.437	Rp. (29.707.313)
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 60.191.250	Rp. 17.016.812	Rp.(43.174.438)
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 48.945.000	Rp. 7.736.250	Rp. (41.208.750)
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 32.130.000	Rp.14.883.500	Rp. (17.246.500)
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 18.205.000	Rp. 4.176.250	Rp. (14.028.750)
		Rp. 199.281.000	Rp. 53.915.249	Rp. (145.365.751)

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

- g. Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan antara lain :

Tabel 3.13
Analisa Program Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

No	Program	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	111,78%	97,47%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	98,47%

3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	98,84%
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	99,32%
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	98,32%

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen adalah 102,36 % dan realisasi keuangan adalah 98,48 % sehingga realisasi kinerja lebih besar capaiannya dari realisasi keuangan.

Program yang terdapat efisiensi penggunaan adalah:

1) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan meningkatnya pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa, dengan sasaran program meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa , terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.176.250 dengan realisasi sebesar Rp. 4.106.000 dengan tingkat capaian sebesar 98,32 %

2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah dengan sasaran program meningkatnya kualitas pelayanan ditingkat kecamatan, terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.883.500 dengan realisasi sebesar Rp.14.783.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,32%.

3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan meningkatkan pencegahan dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sasaran program meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan, terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.7.736.250 dengan realisasi sebesar Rp.7.646.500 dengan tingkat capaian sebesar 98,84%,

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran Program. Sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan terdiri atas 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan sub dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.016.812 dengan realisasi sebesar Rp. 16.756.000 dengan tingkat capaian sebesar 98,47 %.

5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan dengan sasaran program meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan pelayanan public dan meningkatkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, terdiri atas 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.102.437 dengan realisasi sebesar Rp.9.846.500 dengan tingkat capaian sebesar 97.47%.

3. Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan ditampilkan pada table 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP pemerintah kecamatan	Nilai	80,7	80,6	99,81
Nilai SPIP Pemerintah Kecamatan	Nilai	3,1	3,15	101,61

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi Persentase capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan formulasinya Nilai SAKIP Kecamatan berdasarkan data Pemerintahan Kecamatan Kemranjen dengan target 80,70 realisasinya 80,6 dan capaiannya 99,81%. Hal ini menggambarkan bahwa target kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan tidak tercapai.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	N/A	N/A	N/A
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	N/A	76,5	N/A
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	N/A	80,25	N/A
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	N/A	N/A	N/A
Tahun 2025				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	80,7	80,6	99,87
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3,1	3,15	101,67

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Kemranjen di tahun 2025 sampai dengan 2025. Pada periode tahun 2023 sampai dengan 2025, diketahui bahwa data capaian kinerja tidak tersedia karena indikator Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan tidak diukur pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Kinerja Tahun 2025, Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan adalah 80,6 dengan tingkat capaian 99,87%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.16 sebagai berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Nilai SAKIP pemerintah kecamatan	Nilai	80,7	80,6	99,87	81	99,69
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3,1	3,15	101,67	3,1	101,61

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan adalah 80,60 dengan persentase 99,87 %.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 80,6. Apabila dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 99,87%. Nilai Maturitas SPIP adalah 3,15 maka capaian kinerja sudah mencapai 101,67 %.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di
-------------------	-----------	------------------	-----------------	-------------------------------------

				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	80,6	70,01	82,63	66,86	72,40	81,80	72,50

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan data perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar. Indikator yang diukur adalah "Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan" dan realisasi Kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025 berada diatas Standar Nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Kegagalan dalam Pencapaian Target adalah :

- 1) Perencanaan yang kurang matang
- 2) Kualitas indikator kinerja rendah, tidak relevan dengan tujuan strategis, tidak memiliki metode pengukuran yang jelas
- 3) Keterbatasan anggaran tidak mencukupi untuk mencapai target, efisiensi penggunaan anggaran rendah, refocusing atau perubahan anggaran
- 4) Pelaksanaan program tidak optimal, kegiatan tidak berjalan sesuai rencana
- 5) Sumber daya manusia, kurangnya kompetensi dalam penyusunan dan pengelolaan SAKIP
- 6) Dokumentasi dan eviden tidak lengkap

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
- 2) Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata.
- 3) Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.
- 4) Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan secara tepat dan terpercaya.
- 5) Adanya kemauan petugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas.

- 6) Memberikan jaminan dan kepastian dalam pelayanan.
- 7) Memberikan perhatian yang tulus kepada pengguna layanan

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Terdapat hambatan hasil evaluasi kinerja yang tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan atau program, sehingga Solusi yang dilakukan yaitu Mengadakan evaluasi berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan kebijakan yang lebih adaptif.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Kemranjen telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Kemranjen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kemranjen dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kemranjen dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.18
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No.	Program	Anggaran Awal (perubahan 2024/induk 2024) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.550.946.233	2.551.134.969	188.736

			Efisiensi	Rp. 188.736
--	--	--	-----------	-------------

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

- g. Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan antara lain :

Tabel 3.19

Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran

No.	Program	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	117,06%	85,99%

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata realisasi kinerja 117,06% dan reaisasi keuangan kecamatan Kemranjen adalah 85,99% sehingga realisasi kinerja lebih besar capaiannya dari realisasi keuangan.

Program yang terdapat efisiensi penggunaan adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan terdiri atas 6 kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.551.134.969 dengan realisasi sebesar Rp. 2.193.841.508 dengan tingkat capaian sebesar 85,99 %.

4. Program 1: Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Perbandingan antara Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ditampilkan pada table 3.20 sebagai berikut:

Tabel 3.20

Perbandingan target dan Realisasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa	%	100	100	100
Presentase Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	%	100	100	100

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi Persentase APBDes tepat waktu formulasinya ($\text{APBDes tepat waktu} \div \text{Total APBDes} \times 100\%$) dengan target 100%, realisasinya 100% dan capaiannya 100% dan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa formulasinya ($\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa} \div \text{Total Desa} \times 100\%$) dengan target 100%, realisasinya 100% dan capaiannya 100% Hal ini menggambarkan bahwa target kinerja Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa tercapai.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.21 sebagai berikut:

Tabel 3.21

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase APBDes tepat waktu	%	N/A	N/A	N/A
Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase APBDes tepat waktu	%	N/A	N/A	N/A

Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2025				
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa	%	100	100	100
Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Kemranjen di tahun 2023 sampai dengan 2025. Pada periode tahun 2023 sampai dengan 2025, diketahui bahwa data capaian kinerja tidak tersedia karena indikator Persentase APBDes tepat waktu dan Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa tidak diukur pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Kinerja Tahun 2025, Persentase APBDes tepat waktu adalah 100% dan Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa adalah 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.22 sebagai berikut:

Tabel 3.22

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Presentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa	%	100	100	100	100	100

Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
-------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.23 sebagai berikut:

Tabel 3.23

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase APBDes tepat waktu	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Realisasi Kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025 berada diatas standar Nasional.

Tabel di atas menyajikan data perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar. Indikator yang diukur adalah "Persentase APBDes tepat waktu" dan "Persentase Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa". Realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Kemranjen pada

setiap indikator adalah 100%. Namun, data standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar tidak tersedia atau tidak relevan, ditandai dengan "N/A" pada semua kolom.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
- 2) Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

1. Terdapat hambatan hasil evaluasi kinerja yang tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan atau program, sehingga Solusi yang dilakukan yaitu Mengadakan evaluasi berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan kebijakan yang lebih adaptif.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Kemranjen telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Kemranjen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- b) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- c) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kemranjen dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- d) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kemranjen dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.24
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal (induk 2025)	Anggaran Akhir (induk	Selisih (Rp)
----	---------	-------------------------------	--------------------------	--------------

		(Rp)	2025/perubahan 2025)	
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.205.000	4.176.250	(14.028.750)
			Efisiensi	(14.028.750)

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

- g. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa antara lain :

Tabel 3.25
Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa	100%	98,32%

Berdasarkan perbandingan di atas, indikator Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggaran desa memiliki realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan 98,32% sehingga realisasi kinerja lebih besar capaiannya dari realisasi keuangan. Kegiatan yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran yaitu:

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa dengan sasaran program meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, terdiri atas 3 sub kegiatan dan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.176.250 dengan realisasi sebesar Rp. 4.106.000 dengan tingkat capaian sebesar 98,32 %

5. Program 2 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Perbandingan antara Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ditampilkan pada table 3.26 sebagai berikut:

Tabel 3.26

Perbandingan target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	97,3	111,78

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat formulasinya Nilai IKM, realisasinya 97,3 dan capaiannya 111,78% Hal ini menggambarkan bahwa target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik tercapai.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.27 sebagai berikut:

Tabel 3.27

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	87,75	104.46
Tahun 2024				

Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	96,5	112,21
Tahun 2025				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	97,3	111,78

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Kemranjen di tahun 2023 sampai dengan 2025. Pada periode tahun 2023 sampai dengan 2025, diketahui bahwa indikator Indeks Kepuasan Masyarakat selalu tercapai. Berdasarkan Kinerja Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 97,3 dengan tingkat capaian 111,78%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.28 sebagai berikut :

Tabel 3.28

Perbandingan capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	97,25	111,78	110.51	111,78%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 97,25%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 110.51%.

Hal ini dipengaruhi oleh:

- Prosedur pelayanan yang baik berupa kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- Persyaratan pelayanan yang jelas meliputi persyaratan teknis dan administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- Kejelasan petugas pelayanan meliputi keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggungjawabnya).

- d) Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- e) Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- f) Keadilan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
- g) Kesopanan petugas pelayanan meliputi sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- h) Adanya kepastian biaya pelayanan meliputi kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- i) Adanya kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- j) Adanya kenyamanan lingkungan meliputi kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan.
- k) Adanya keamanan layanan meliputi terjaminnya tingkat keamanan lingkungan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- a) Telah ditetapkan prosedur pelayanan yang jelas.
- b) Telah ditetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas.
- c) Adanya kepastian petugas yang memberikan pelayanan termasuk kewenangan dan tanggungjawabnya.

- d) Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat telah ditingkatkan.
 - e) Telah meningkatkan kecepatan pelayanan.
 - f) Telah melaksanakan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
 - g) Telah meningkatkan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
 - h) Telah memberikan kepastian biaya pelayanan.
 - i) Telah memberikan kepastian jadwal pelayanan.
 - j) Telah memberikan kenyamanan lingkungan.
 - k) Telah memberikan rasa aman terhadap pelayanan.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.29 sebagai berikut:

Tabel 3.29

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Kepuasan Masyarakat	97,3	N/A	88	99.7	90.17	93.78	96.76

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan data perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar. Indikator yang diukur adalah "Indeks Kepuasan Masyarakat". Realisasi yang dicapai oleh Kecamatan

Kemranjen adalah 97,3. Dengan demikian realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2025 berada diatas Standar Provinsi Jawa Tengah.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- a) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
- b) Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- a) Terdapat hambatan hasil evaluasi kinerja yang tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan atau program, sehingga Solusi yang dilakukan yaitu Mengadakan evaluasi berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan kebijakan yang lebih adaptif.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.30

Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	39.809.750	10.102.437	29.707.313
			Efisiensi	Rp. 29.707.313

Sumber : DPPA-SKpd Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

- g. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik antara lain :
- Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik Kecamatan Kemranjen antara lain :

Tabel 3.31

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	96,81%
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	99%

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen adalah 100% dan realisasi keuangan adalah 97,90%.

Adapun Rincian Kegiatan adalah Sebagian berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.
Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sasaran program Meningkatnya kualitas pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik, terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.853.000 dengan realisasi sebesar Rp.3.730.000 dengan tingkat capaian sebesar 96,81%
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan dengan sasaran program Meningkatnya kualitas pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik, terdiri atas 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.600.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.584.000 dengan tingkat capaian sebesar 99%.

6. Program 3 : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Perbandingan antara Indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2025 dengan Realisasi Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ditampilkan pada table 3.32 sebagai berikut

Tabel 3.32

Perbandingan target dan Realisasi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Presentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas formulasinya (Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi) dikali 100 % realisasinya 100 % dengan capaian 100 % dan Persentase penanganan pengaduan formulasinya aduan yang ditangani dibagi aduan yang masuk berdasarkan tupoksi dikali 100% realisasinya 100 % dan capaiannya 100% Hal ini menggambarkan bahwa target kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tercapai.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.33 sebagai berikut:

Tabel 3.33

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 s.d 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	N/A	N/A	N/A	N/A

Presentase Penanganan Pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	N/A	N/A	N/A	N/A
Presentase Penanganan Pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Presentase Penanganan Pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2025				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Presentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Kemranjen di tahun 2023 sampai dengan 2025. Pada periode tahun 2023 sampai dengan 2025, diketahui bahwa data capaian kinerja tidak tersedia karena indikator Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas dan Presentase Penanganan Pengaduan tidak diukur pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Kinerja Tahun 2025, Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas adalah 100% dan Presentase Penanganan Pengaduan adalah 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.34 sebagai berikut:

Tabel 3.34

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026	Persentase Kinerja
		Target	Realisasi	%		

					akhir Renstra	Renstra s.d th 2025
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100
Presentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas sebesar 100% sehingga apabila dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Pada indikator Presentase Penanganan Pengaduan realisasi kinerjanya sebesar 100% sehingga apabila dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 100%

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.35 sebagai berikut:

Tabel 3.35

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Presentase Penanganan Pengaduan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan data perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar. Indikator

yang diukur adalah " Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas" dan "Presentase Penanganan Pengaduan". Realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Kemranjen adalah 100%. Namun, data standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar tidak tersedia atau tidak relevan, ditandai dengan "N/A" pada semua kolom.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
- 2) Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Terdapat hambatan hasil evaluasi kinerja yang tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan atau program, sehingga Solusi yang dilakukan yaitu Mengadakan evaluasi berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan kebijakan yang lebih adaptif.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Kemranjen telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Kemranjen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
3. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kemranjen dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja

4. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kemranjen dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.36

Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	48.945.000	7.736.250	(41.208.750)
			Efisiensi	Rp. (41.208.750)

Sumber ; DPPA-SKPD Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

- g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja untuk Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban di Tingkat Kecamatan antara lain :

Tabel 3.37

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	98,84%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dan realisasi keuangan diatas, diketahui bahwa capaian Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan Kecamatan Kemranjen tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Kemranjen telah dilaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum secara berkala dan melibatkan seluruh pihak yang terkait.

7. Program 4 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Perbandingan antara Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ditampilkan pada table 3.38 sebagai berikut :

Tabel 3.38

Perbandingan target dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.39 sebagai berikut :

Tabel 3.39

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 s.d 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2025				
Persentase pemberdayaan	%	100	100	100

masyarakat desa dan kelurahan				
-------------------------------	--	--	--	--

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Kemranjen di tahun 2023 sampai dengan 2025. Pada periode tahun 2023 sampai dengan 2025, diketahui bahwa data capaian kinerja tidak tersedia karena indikator Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tidak diukur pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Kinerja Tahun 2025, Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah 100%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.40 sebagai berikut:

Tabel 3.40

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Renstra

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar 100% sehingga apabila dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 100%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.41 sebagai berikut:

Tabel 3.41

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan data perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar. Indikator yang diukur adalah " Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan". Realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Kemranjen adalah 100%. Namun, data standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar tidak tersedia atau tidak relevan, ditandai dengan "N/A" pada semua kolom.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

1. Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
2. Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Terdapat hambatan hasil evaluasi kinerja yang tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan atau program, sehingga Solusi yang dilakukan yaitu Mengadakan evaluasi berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan kebijakan yang lebih adaptif.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Kemranjen telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Kemranjen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- b) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- c) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kemranjen dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- d) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kemranjen dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.42
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No.	Program	Anggaran Awal (perubahan 2024/induk 2024) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	60.191.250	17.016.812	(43.174.438)
			Efisiensi	Rp. (43.174.438)

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

- g. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan antara lain :

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja untuk Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Kemranjen antara lain:

Tabel 3.43

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	98,77
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100%	97,88%

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen adalah 100% dan realisasi keuangan adalah 98,32%. sehingga realisasi kinerja lebih besar capaiannya dari realisasi keuangan. Kegiatan yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran yaitu:

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan sasaran program Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.264.562 dengan realisasi sebesar Rp.11.126.000 dengan tingkat capaian sebesar 98,77

2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan dengan sasaran program Meningkatnya Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.752.250 dengan realisasi sebesar Rp. 5.630.500 dengan tingkat capaian sebesar 97,88%.

8. Program 5 : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

- a. Perbandingan antara Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditampilkan pada table 3.44 sebagai berikut:

Tabel 3.44

Perbandingan target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.45 sebagai berikut :

Tabel 3.45

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 s.d 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	N/A	N/A	N/A	N/A
Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	N/A	N/A	N/A	N/A

Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2025				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Kemranjen di tahun 2023 sampai dengan 2025. Pada periode tahun 2023 sampai dengan 2025, diketahui bahwa data capaian kinerja tidak tersedia karena indikator Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dan Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tidak diukur pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Kinerja Tahun 2025, Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan adalah 100% dan Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum adalah 100%

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.46 sebagai berikut :

Tabel 3.46

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pelaksanaan	%	100	100	100	100	100

urusan yang ditugaskan						
Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan sebesar 100% sehingga apabila dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Pada indikator Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum realisasi kinerjanya sebesar 100% sehingga apabila dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 100%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.47 sebagai berikut :

Tabel 3.47

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel di atas menyajikan data perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kemranjen tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar. Indikator yang

diukur adalah "Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan" dan "Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum". Realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Kemranjen adalah 100%. Namun, data standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar tidak tersedia atau tidak relevan, ditandai dengan "N/A" pada semua kolom.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
- 2) Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Terdapat hambatan hasil evaluasi kinerja yang tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan atau program, sehingga Solusi yang dilakukan yaitu Mengadakan evaluasi berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan kebijakan yang lebih adaptif.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Kemranjen telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Kemranjen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- b) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- c) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kemranjen dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja

- d) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kemranjen dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.48
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.130.000	14.883.500	(17.246.500)
			Efisiensi	Rp(17.246.500)

Sumber : DPPA – SKPD Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

- g. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum antara lain :

Tabel 3.49
Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	99,85%

C. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kemranjen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Table 3.50
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kemranjen Tahun 2025

Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	2.551.134.969	2.193.841.508	85,99	85,99
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.102.437	9.846.500	97,47	73,81
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	17.016.812	16.756.500	98,47	88,79
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.736.250	7.646.500	98,84	98,84
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.883.500	14.783.000	99,32	93,98
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.176.250	4.106.000	98,32	98,32

Sumber : Aplikasi JeGos 2025

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51

Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	109,275	2.289.177.142	95,48
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	1	119,11	102.331.500	94,14
3	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	1	99,44	2.186.845.642	95,24
Jumlah			327,825	Rp. 4.578.354.284	284,86

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kemranjen.

Selanjutnya, bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan.

Tabel 3.52
Tingkat Efisiensi Penggunaa Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4-5 (apabila kolom 4 tercapai
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	109,275	95,48	13,79%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	1	119,11	94,14	24,97%
3.	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	1	99,44	95,24	0
jumlah					38,765%

Sumber : aplikasi E-Monev 2025.

Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 1 paket

dengan total sebesar Rp 550.000, realisasi nilai kontrak sebesar Rp 550.000, sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-Catalog dilaksanakan dengan metode e-Purchasing dan pada tahun 2025 Kecamatan Kemranjen telah melaksanakan sebanyak 1 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 550.000, realisasi pengadaan sebesar Rp 550.000, sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Kemranjen Tahun 2025 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, LkjiP Kecamatan Kemranjen telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

LkjiP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja utama Kecamatan Kemranjen telah tercapai melebihi target yang diharapkan.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang, langkah yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kemranjen adalah melakukan upaya perbaikan dan berkomitmen serta secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan Pada Komponen Perencanaan Kinerja, Komponen Pengukuran Kinerja,Komponen Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja Internal.

Kemranjen , 2 Januari 2026

